



PROYEK PERUBAHAN

JUDUL

***STRATEGI DVI BANTEN MENINGKATKAN JALUR KOORDINASI DAN KERJASAMA
KEBENCANAAN DALAM OPERASI DVI (IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL)
MELALUI PEMBENTUKAN SUB KLASTER DVI DALAM BENTUK PERJANJIAN
KERJA SAMA (PKS)***

Disusun Oleh:

drg. ALFIN FARDENI HARAHAP, M.M

NDH: 09

KELAS : MERAH PUTIH

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGKATAN XVIII

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI POLRI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA RI

BANDUNG, NOVEMBER 2022

LAPORAN AKHIR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

JUDUL

STRATEGI DVI BANTEN MENINGKATKAN JALUR KOORDINASI DAN KERJASAMA KEBENCANAAN DALAM OPERASI DVI (IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL) MELALUI PEMBENTUKAN SUB KLASTER DVI DALAM BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



Oleh :

drg. ALFIN FARDENI HARAHAHAP, M.M

NDH: 09

Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
Angkatan XVII Tahun 2022

LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI
PUSAT PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI BANDUNG
2022

Laporan Proyek Perubahan drg. Alfin Fardeni H.

LEMBAR PERSETUJUAN

JUDUL

**STRATEGI DVI BANTEN MENINGKATKAN JALUR
KOORDINASI DAN KERJASAMA KEBENCANAAN DALAM
OPERASI DVI (IDENTIFIKASI KORBAN MENINGGAL) MELALUI
PEMBENTUKAN SUB KLASTER DVI DALAM BENTUK
PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)**



PARLINDUNGAN, S.E., M.T.,AK
PEMBINA NIP 197605162005101005

dr. AGUNG WIDODO, Sp.M
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68020527

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia, kesempatan dan kesehatan serta perkenan dan bimbinganNya sehingga penulisan Laporan Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, Sholawat serta salam tercurah kepada Rasulullah SAW sebagai Inspiratif Leader sepanjang masa.

Selama Penyusunan dan Implementasi Proyek Perubahan dalam mengikuti PKN II sejak tanggal 26 Juli 2022 s.d 16 november 2022 di Pusdikmin Lemdiklat Polri di Gede Bage Bandung, Penulis telah mendapatkan perhatian, saran, bimbingan, dan dukungan yang membangun dari berbagai pihak. Untuk Itu Penulis menyampaikan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, S.H., M.H., M.B.A. Jabatan Kapolda Banten selaku Sponsor yang telah memberikan arahan, petunjuk dan dukungan sehingga Proyek Perubahan ini dapat diselesaikan;
2. Komisaris Besar Polisi dr. Agung Widodo, Sp.M. Jabatan Kabiddokkes Polda Banten selaku Mentor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang luar biasa untuk pengembangan proyek perubahan ini;
3. Dr. dr. Ati Pramudji Hastuti, MARS sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan yang luar biasa dalam menyelesaikan Proyek Perubahan ini;
4. Parlindungan, S.E., M.T.,AK selaku Coach yang telah memberikan bimbingan, saran dan nasehat dalam penyempurnaan Proyek Perubahan ini;
5. Komisaris Besar Polisi Dedy Suhartono, S.I.K, M.M. Jabatan Karoops Polda Banten yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini;
6. Komisaris Besar Polisi Dede Rojudin, S.I.K., M.H. Jabatan Dansatbrimob Polda Banten yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini.
7. Komisaris Besar Polisi Gieuseppe Reinhard Gultom, S.I.K. Jabatan Dirpolairud Polda Banten yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini.
8. Komisaris Besar Polisi Murwoto, S.H., S.I.K. Jabatan Dirsamapta Polda Banten yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini.

9. Komisaris Besar Polisi Yuliani, S.H., M.H. Jabatan Kabidkum Polda yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini.
10. Ajun Komisaris Besar Polisi Kukuh Priyo Taruno, S.I.K., M. Tr.S.O.U. Jabatan Kabagkerma Roops Polda Banten yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Proyek Perubahan ini.
11. Kasubbid Dokpol dan Tim Efektif Biddokkes Polda Banten;
12. Para Widyaswara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pencerahan selama mengikuti PKN II;
13. Seluruh tim efektif beserta staf yang telah membantu penulis menyelesaikan Proyek Perubahan ini;
14. Teman teman Peserta PKN II Angkatan XVIII Tahun 2022 Pusdikmin Lemdiklat Polri yang selalu memberikan bantuan dan semangat dalam penyelesaian proyek perubahan ini;
15. Ibu dan Ayah kandung, Istri ku tercinta, anak – anak ku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat serta doa dalam penyusunan Proyek Perubahan ini.

Sebagai Produk pembelajaran, Proyek Perubahan ini masih mengandung banyak kekurangan, namun apabila dapat diimplementasikan dalam mendukung tugas pokok Biddokkes Polda Banten, akan sangat bermanfaat bagi seluruh Personil Polda Banten dan Jajaran.

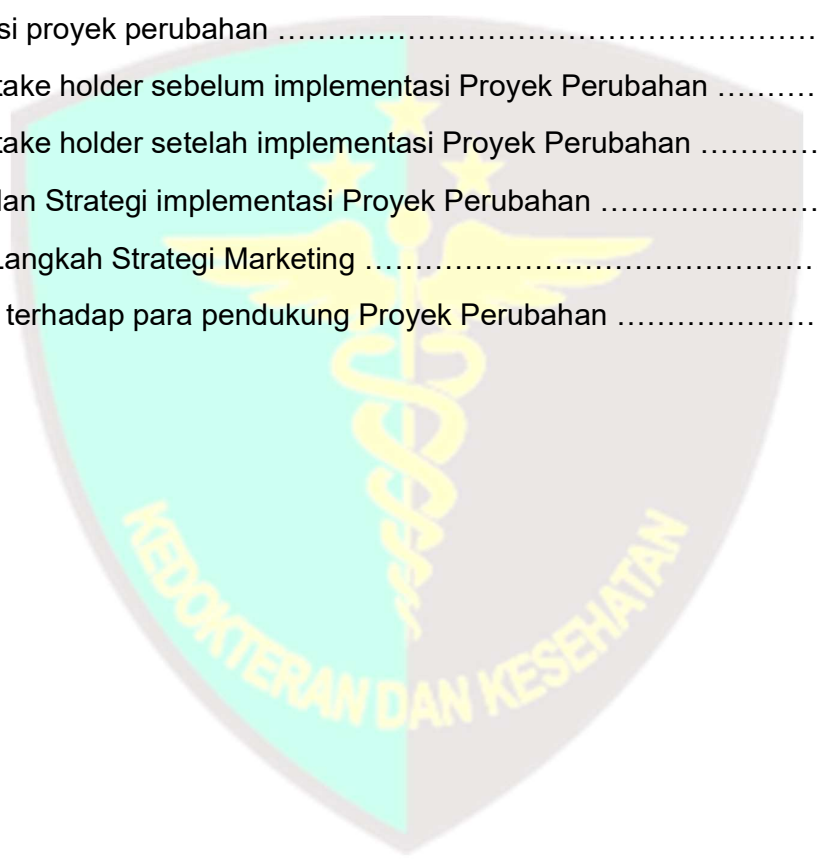
DAFTAR ISI

Form Persetujuan Mentor	i
Form Coach	ii
Daftar Isi	lii
Daftar Tabel	v
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Profil Instansi	1
2. Isu-isu Strategis & Permasalahan	2
3. Analisis Permasalahan	5
B. TUJUAN	
Tujuan Utama	8
1. Tujuan Jangka Pendek	8
2. Tujuan Jangka Menengah	9
3. Tujuan Jangka Panjang.....	9
C. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	9
II. HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN.....	12
A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN	12
1. Kesesuaian antara Milestone Perencanaan dan Implementasi ...	12
2. Kesesuaian antara Milstone Perencanaan dan Implementasi	15
B. MANFAAT	19
1. Manfaat Internal	19
2. Manfaat Eksternal bagi Masyarakat dan Stakeholders	19
C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN STRATEGIS	20
1. Koordinasi dan pendampingan kepada pendukung implementasi Proyek Perubahan	20
a. Mentor	20
b. Coach	21
c. Tim Efektif	21
d. Narasumber	22

e. Stakeholder	22
2. Memimpin Rapat	23
3. Memobilisasi stakeholder	23
4. Melaksanakan strategi manajemen perubahan dalam mengatasi Kendala dan permasalahan	26
D. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING	28
E. KEBERLANJUTAN	30
F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR	30
1. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi	31
2. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi	32
G. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN	37
1. Manajemen Pemerintahan	37
2. Manajemen Keuangan Negara	37
3. Kepemimpinan Digital	38
4. Hak Asasi Manusia	38
H. LESSON LEARNT	39
III. PENUTUP	40
SIMPULAN	40
TINDAK LANJUT	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	
EVIDENCE	
SERTIFIKAT SEMINAR	
DUKUNGAN STAKE HOLDER	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Operasi DVI Banten	3
Tabel 2 Rumah Sakit yang memiliki Instalasi Forensik diwilayah Prov Banten.....	5
Tabel 3 Daftar Puskesmas di Provinsi Banten	5
Tabel 4 SDM Subbid Dokpol Biddokkes Poldabanten	6
Tabel 5 Data Hubungan Tata Kerja Lintas Sektor	7
Tahapan Proyek Perubahan	9
Implementasi proyek perubahan	12
Mobilisasi stake holder sebelum implementasi Proyek Perubahan	25
Mobilisasi stake holder setelah implementasi Proyek Perubahan	26
Hambatan dan Strategi implementasi Proyek Perubahan	27
Langkah – Langkah Strategi Marketing	28
Kompetensi terhadap para pendukung Proyek Perubahan	32



I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Profil Instansi

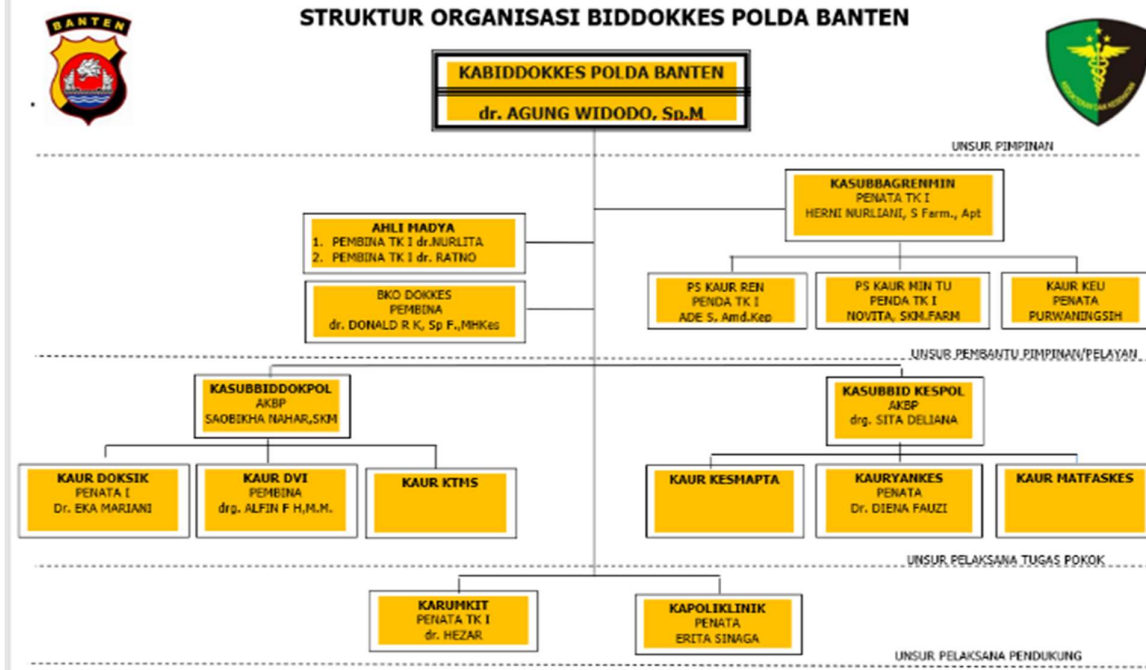
Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 13 disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf h dikatakan bahwa Polri juga bertugas menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah tugas pokok Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) adalah memberikan pelayanan Kesehatan Kepolisian (Kespol) dan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) bagi personil Polri beserta keluarga serta masyarakat umum.

Subbiddokpol terdiri dari urusan Kesehatan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Ur Keskamtibmas), Urusan Kedokteran Forensik (Urdoksik) dan Urusan Disaster Victim Identification (Ur DVI).

Urusan Disaster Victim Identification (Ur DVI) bertugas melaksanakan kegiatan operasi DVI, mengumpulkan data Ante Mortem (odontogram), kerjasama serta pelatihan untuk mengidentifikasi korban meninggal massal karena bencana.



Pimpinan dan Seluruh Staff Biddokkes Polda Banten 1



2. Isu – isu strategis & Permasalahan

Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa – Bangsa untuk strategi internasional pengurangan resiko bencana (UN-ISDR). Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Pada bagian Selatan dan Timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera-Jawa-Nusa tenggara-Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan daratan rendah yang sebagian didominasi oleh rawa – rawa, kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor.

Wilayah Provinsi Banten merupakan salah wilayah di Indonesia yang termasuk dalam daerah rawan bencana berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banten (2017), ada dua kabupaten di Provinsi Banten yang merupakan daerah rawan bencana alam yaitu Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dari 14 jenis potensi bencana yang ada di Indonesia 13 potensi bencana alam ada di

Provinsi Banten antara lain banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang tinggi, tsunami, gunung berapi dan lain-lain.

Tabel 1. OPERASI DVI BANTEN

NO	WAKTU KEJADIAN	JENIS BENCANA	JUMLAH KORBAN MENINGGAL	KETERANGAN
1	31 JULI 2007	Pembunuhan Dukung penggandaan uang di Lebak	5 korban	teridentifikasi
2	28 JANUARI 2011	Kebakaran KMP Laut Teduh 2 di Selat Sunda	29 korban	17 orang hilang dan 7 tidak teridentifikasi
3	26 SEPTEMBER 2012	Tenggelamnya KMP Bahuga Jaya di Perairan Selat Sunda	8 korban	3 korban tidak ditemukan dan 2 korban tidak teridentifikasi
4	14 AGUSTUS 2015	Tenggelamnya Kapal Motor Hujan Labek 2 di Selat Sunda	12 korban	12 korban tidak ditemukan
5	18 FEBRUARI 2016	Ledakan Pabrik Kimia PT Dover Chemical Cilegon	1 korban	teridentifikasi
6	25 JULI 2016	Tanah longsor yang mengakibatkan banjir lumpur di Lippo Carita	4 korban	teridentifikasi
7	09 FEBRUARI 2017	Banjir dan tanah Longsor di Lebak	1 korban	teridentifikasi
8	23 MEI 2017	Kebakaran di pemukiman suku Baduy	Tidak ada korban	-
9	10 JULI 2017	Kebakaran PT Candra Asri di cilegon	Tidak ada korban	-
10	11 AGUSTUS 2017	Ledakan di galangan kapal di cilegon	5 korban	teridentifikasi
11	23 JANUARI 2018	Gempa bumi di Lebak	Tidak ada korban	-
12	22 DESEMBER 2018	Tsunami Selat Sunda akibat luruhnya anak gunung Krakatau	426 korban	5 korban belum teridentifikasi
13	1 JANUARI 2020	Banjir bandang di Cipanas Lebak	3 korban	teridentifikasi
14	8 SEPTEMBER 2021	Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang	41 korban	teridentifikasi
15	26 JULI 2022	Kecelakaan odong - odong tertabrak kereta api	9 korban	teridentifikasi

Selain data tersebut diatas banyak identifikasi korban korban kasus pembunuhan dimana kasus tersebut banyak bermuara bagi penyidik untuk melakukan penyidikan setelah jenazah Mr. X teridentifikasi. Data data tersebut banyak yang disimpan penyidik karena bersifat rahasia dan secara kode etik kita tidak menampilkan data tersebut karena data tersebut bersifat rahasia untuk kepentingan penyidikan.

Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 pasal 13 disebutkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 pasal 14 ayat 1 huruf h dikatakan bahwa Polri juga bertugas menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium kepolisian dan psikologi kepolisian.

Dimana tugas pokok Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Banten adalah memberikan pelayanan Kesehatan Kepolisian (Kespol) dan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) bagi personil Polri beserta keluarga serta masyarakat umum.

Dalam suatu kejadian bencana massal baik karena alam atau perbuatan manusia yang kejadiannya selalu tiba-tiba, sudah menjadi kewajiban universal, dimana setiap korban mati harus dilakukan proses identifikasi, sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 pasal 51 ayat 5 menyatakan bahwa “terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya”.

Dari gambaran diatas didapatkan bahwa dalam proses Operasi DVI (identifikasi korban meninggal karena bencana) belum berjalan secara baik dan terkoordinasi secara tepat, karena banyak kendala-kendala dilapangan terutama jalur koordinasi dan bekerja sama, banyak stakeholder eksternal yang mengutamakan ego sektoralnya dalam penanganan jenazah yaitu ingin tampil di media dan masyarakat, padahal dalam hal identifikasi perlu suatu ilmu pasti dan bisa dipertanggung jawabkan secara sah dan hukum sehingga perlu adanya analisa dan evaluasi penanganan korban Disaster Victim Identification (DVI) agar dapat berjalan baik bila suatu saat ada bencana massal, maka diperlukan payung hukum dalam bentuk subklaster DVI sesuai dengan arahan dari keputusan kepala BNPB. Selain itu perlu pertemuan lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama, baik internal Polri dan eksternal Polri. Diharapkan dengan kegiatan tersebut penanganan korban bencana massal dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam mengidentifikasi korban meninggal akibat bencana massal agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengacu pada standar baku Interpol dan DVI Internasional.

3. Analisis Permasalahan

Tabel 2
RUMAH SAKIT YANG MEMILIKI INSTALASI FORENSIK
DIWILAYAH PROVINSI BANTEN

NO	RUMAH SAKIT	KOTA
1.	RSUD Propinsi Banten	Kota Serang
2.	RS Bhayangkara Polda Banten	Kota Serang
3.	RSUD Drajat Prawira	Kota Serang
4.	RSUD Panggungrawi	Kota Cilegon
5.	RSUD Berkah	Pandeglang
6.	RS Aji Darmo	Lebak
7.	RSUD Balaraja	Tangerang
8.	Siloam hospital lippo Village	Tangerang
9.	RSUD kota Tangerang	Tangerang
10.	RSUD Tangerang Selatan	Tangerang Selatan

Dari tabel diatas, dapat terlihat banyak Rumah Sakit di wilayah Provinsi Banten yang cukup banyak namun fasilitas instalasi forensik hanya terdapat di beberapa Rumah Sakit, dan tidak merata di setiap wilayah Kabupaten/kota Provinsi Banten, sehingga perlu adanya wadah subklaster DVI, agar di kemudian hari bilamana ada bencana massal, penanganan korban semakin jelas pembagian tugas masing-masing Rumah Sakit.

Tabel 3
DAFTAR PUSKESMAS DI PROVINSI BANTEN

NO	KOTA	JUMLAH PUSKESMAS	KETERANGAN
1.	SERANG KOTA	16	
2.	SERANG	18	
3.	CILEGON	8	
4.	PANDEGLANG	34	
5.	LEBAK	42	

6.	KOTA TANGERANG	24	
7.	METRO TANGERANG	32	
8.	TANGERANG SELATAN	29	

Sumberdata : Dinkes Propinsi/Kota/Kabupaten

Dari tabel diatas, wilayah Propinsi Banten memiliki sarana pelayanan kesehatan puskesmas yang cukup banyak, maka perlu adanya pertemuan berkala para kepala puskesmas dalam hal untuk meningkatkan jejaring koordinasi dan kerja sama di perlukan suatu wadah Subklaster DVI, bilamana ada bencana massal penanganan korban akan lebih cepat, akurat, dan tepat serta bisa dipertanggungjawabkan kepada keluarga korban.

Tabel 4

SDM SUBBID DOKPOL BIDDOKKES POLDA BANTEN

NO	URAIAN	PANGKAT	DSP	RIIL	DIK DOKPOL	DIK DVI
1	KASUBBIDD OKPOL	AKBP/IVB	1	1	√	√
2	KAUR DOKSIK	KOMPOL PEMBINA/IVA	1	1	√	√
3	KAUR DVI	KOMPOL PEMBINA/IVA	1	1	√	√
4	KAUR KTMS	KOMPOL PEMBINA/IVA	1	1	-	-
5	PAUR	AKP/PENATA/ IIC/D	3	3	√ (1)	-
6	BAMIN/BAN UM	BA/II/I	3	3	-	-

Sumber data :Biddokkes Polda Banten

Dari tabel diatas, masih ada personil di Subbiddokpol yang belum pendidikan kejuruan Kedokteran Kepolisian (Dokpol) dan pendidikan DVI/JCLEC, sehingga kompetensi perlu ditingkatkan agar hasil proses identifikasi lebih profesional dan ilmiah.

Tabel 5

Data Hubungan Tata Kerja Lintas Sektor

NO.	JEJARING KERJA	KETERSEDIAAN SDM	SARPRAS	HUBUNGAN KERJA
1	Gubernur Banten	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Dukungan Komitmen
2	Direktur RS	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Kerja sama Kemitraan Rujukan
3	Dinas Kesehatan	Kurang Memadai	Cukup Memadai	Koordinasi Kerja sama
4	Korem 064 Maulana Yusuf	Kurang Memadai	Cukup Memadai	Kerja sama
5	Dinas Sosial	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Kerja sama
6	Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Banten	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Kemitraan
7	PERSI	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Koordinasi Kerja sama
8	PDFI	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Kemitraan
9	PMI	Kurang Memadai	Cukup Memadai	Kerja sama
10	Basarnas	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Kerjasama
11	BPBD	Cukup Memadai	Kurang Memadai	Koordinasi Kerja sama
12	LSM//Ormas	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Kerja sama
13	Media Elektronik & Cetak	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Kerja sama
14	Ditreskrimum	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Koordinasi Kerja sama
15	Ditsabhara	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Koordinasi Kerja sama
16	Ditpolairud	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Koordinasi Kerja sama
17	Satbrimobda	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Koordinasi Kerja sama
18	Kapolres	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Koordinasi Kerja sama
19	SPN Mandalawangi	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Koordinasi Kerja sama
20	Kasubbid Dokpol	Cukup Memadai	Cukup Memadai	Arahan Petunjuk Teknis
21	Ur Dokkes Polres/Ta di Polda Banten	Kurang Memadai	Kurang Memadai	Arahan Petunjuk Teknis

Dari tabel diatas perlu ditingkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor baik internal maupun eksternal Polri dalam suatu wadah Subklaster DVI dalam penanganan Disaster Victim Identification (DVI) untuk mengidentifikasi korban bencana massal di Propinsi Banten.

Dari gambaran diatas dapat di Analisa Permasalahannya bahwa masih berkurangnya jalur koordinasi dalam penanganan Operasi DVI dimana banyak kejadian bencana di Banten masing masing stakeholder masih bekerja masing masing sesuai dengan arahan pimpinan sehingga harus di bentuk wadah Subklaster DVI sehingga penulis mengajukan proyek perubahan berjudul * **Strategi DVI Banten Meningkatkan Jalur Koordinasi Dan Kerjasama Kebencanaan Dalam Operasi DVI (Identifikasi Korban Meninggal) Melalui Pembentukan Sub Klaster DVI Dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)**".

B. TUJUAN

Tujuan Utama

Meningkatkan jalur koordinasi dan kerja sama Subklaster DVI dalam penanganan korban Disaster Victim Identification (DVI) pada kegiatan Operasi Disaster Victim Identification (DVI) agar proses identifikasi korban bencana massal terlaksana secara cepat, tepat, akurat dan professional.

1. Tujuan Jangka Pendek

- a. Tersusunnya draft subklaster DVI Banten;
- b. Tersusunnya Sub Klaster DVI Banten dalam bentuk perjanjian kerja sama;
- c. Terbentuknya HTCK / SOP subklaster DVI;
- d. Terbentuknya posko subklaster DVI di Biddokkes Polda Banten;
- e. Pelatihan HTCK subklaster DVI.

2. Tujuan Jangka Menengah

- a. Sosialisasi Sub Klaster Disaster Victim Identification (DVI) Banten kepada Stakeholder;
- b. Monitoring dan evaluasi Sub Klaster Disaster Victim Identification (DVI) Banten;
- c. Pembentukan klaster kebencanaan yang dipimpin oleh BPBD Banten.

3. Tujuan Jangka Panjang

- a. Pelatihan Subklaster DVI secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan Kerjasama;
- b. Pelaksanaan Operasi DVI bila terjadi bencana yang menyebabkan korban meninggal;
- c. Terbentuknya klaster - klaster kebencanaan di BPDB sebagai payung hukum dalam bertindak.

C. TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

Milestones	Output Milestones	Rincian Kegiatan	Waktu	Stakeholder yang terlibat	Peran tim Leader
Jangka pendek	Usulan rancangan proyek perubahan	Diskusi dengan kabiddokkes	29 Agustus 2022	kabiddokkes	Memimpin diskusi dengan kabiddokkes
	Terbentuk Rancangan Tim Efektif	Rapat dengan Rancangan Rancangan Tim Efektif	30 Agustus 2022	Rancangan Tim Efektif Personil Biddokkes	Memimpin Rapat, menerima saran dan masukan
	Penyesuaian rancangan proyek perubahan	Menghadap Kabag Kerma roops Polda Banten,	31 Agustus 2022	Kabag Kerma dan staf beserta team efektif,	Menyampaikan gagasan proyek perubahan dan menerima masukan/saran
	Sprin Kapolda tentang Mentor	Mengajukan Sprin Kapolda tentang Mentor	31 Agustus 2022	Kabiddokkes	Mengarahkan Personil Biddokkes
	Pertimbangan Proyek perubahan terhadap stakeholder eksterna BPBD	Menghadap sekretaris BPBD Banten	1 September 2022	Sekretaris BPBD dan staf beserta team efektif	Menyampaikan gagasan proyek perubahan dan menerima masukan/saran
	Penentuan judul proyek perubahan	Menghadap kabiddokkes	2 September 2022	kabiddokkes	Menyampaikan sran dan masukkan dari ops polda dan BPBD tentang proyek perubahan
	Surat Kapolda tentang	Mengirim surat	12 September 2022	Ka laghar BPBD dan pejabat	Rapat koordinasi awal dalam penentuan proyek

	undangan rapat lintas sektor	undangan ke stakeholder eksternal		terkait BPBD, kabag kerma dan team efektif	perubahan
	Surat perintah Kapolda tentang Tim Efektif	Diskusi dengan Kasubbid Dokpol, Kaur DVI dan staf	13 September 2022	Kasubbid Dokpol, Kaur DVI dan Staf	Memimpin diskusi dengan staf Biddokkes
	Penyusunan konsep sub klaster DVI	Rapat internal team efektif dokkes,	14-17 september 2022	Kasubbid dokpol dan team efektif	Bersama kasubbid dokpol dan team efektif memimpin diskusi konsep subklaster DVI
	Notulen rapat internal dengan ro ops	Rapat internal dengan biro ops	19-24 September 2022	Kabagkerma dan team efektif	Menyampaikan saran dan masukkan terhadap konsep subklaster DVI
	Notulen rapat internal team efektif	Rapat internal dokkes	26-30 september 2022	Kasubbidokpol dan team efektif	Menyampaikan saran dan masukkan terhadap draft subklaster DVI
	Koordinasi dengan kabiddokkes	Menghadap kabiddokkes	1 oktober 2022	kabiddokkes	Persetujuan draft awal subklaster DVI dilingkungan internal
	Membuat sprint tim Pokja	Menghadap Kapolda		Kapolda	Sprint Kapolda tentang tim Pokja Sub Klaster DVI
	Draft Sub Klaster DVI dengan pihak eksternal	Diskusi dan konsultasi dengan stakeholder eksternal	2-7 oktober 2022	Kabagkerma, Kalaghar BPBD beserta pejabat berwenang di BPBD beserta team efektif	Konsultasi, Diskusi, Menyampaikan saran dan masukkan terhadap draft subklaster DVI
	Konsep Draft Sub Klaster DVI	Diskusi dan konsultasi dengan Karoops dan Kabiddokkes	10-11 Oktober 2022	Karoops dan Kabiddokkes	Konsultasi, Diskusi
	Konsep draft Subklaster DVI	Verifikasi draft subklaster DVI	12-21 oktober 2022	Kabidkum dan Kasetum	Konsultasi dan diskusi
	Konsep draft subklaster DVI	Diskusi dan konsultasi konsep draft subklaster DVI dengan biro hukum provinsi Banten	26-30 oktober 2022	BPBD, kabag kerma dan team efektif, dan biro hukum provinsi	Konsultasi dan diskusi tentang konsep draft subklaster DVI
	Draft subklaster DVI	Menghadap Kabiddokkes dan Karoops	1 november 2022	Karoops dan Kabiddokkes	Konsultasi hasil draft subklaster DVI
	Penandatanganan Subklaster DVI	Kapolda dan Ka BPBD	2 November 2022	Kapolda dan Ka BPBD	Penandatanganan PKS Subklaster DVI
	Posko subklaster DVI	Meresmikan Posko DVI	3-4 November 2022	Kabiddokkes	Pendirian Posko Subklaster DVI
	Sosialisasi HTCK Subklaster DVI	Penerapan HTCK Subklaster DVI	6-11 November 2022	Stakeholder internal dan eksternal	Pelatihan HTCK subklaster DVI

Jangka Menengah	PKS Subklaster DVI	Menghadap BPBD	14 November 2022	Kalaghar BPBD	Penyerahan hasil PKS Subklaster DVI
	Sosialisasi Sub Klaster DVI Propinsi Banten	Mensosialisasikan Sub Klaster DVI Provinsi Banten	15 November - Desember 2022	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Sosialisasi
	Notulen pertemuan berkala Tim Klaster DVI Provinsi Banten	Pertemuan berkala Tim DVI Propinsi Banten	Januari 2023	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Memimpin pertemuan berkala
	Hasil monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi (feedback)	Februari - Maret 2023	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Menerima feedback dan masukan/saran
Jangka Panjang	Hasil Penyusunan Sub Klaster DVI Propinsi Banten	Melaksanakan Sub Klaster DVI Provinsi Banten	April 2023	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Menerima feedback dan masukan/saran
	Koordinasi lintas sektoral	Mendorong terbentuknya klaster di BPBD	Mei - September 2023	Klaster klaster BPBD	Terbentuknya klaster klaster BPBD
	Operasi DVI	Sinergitas dan Kerjasama operasi DVI	2023	Stakeholder internal dan eksternal	Terjalannya sinergitas dan Kerjasama dalam operasi DVI
	Notulen pertemuan berkala Tim Klaster DVI Provinsi Banten	Pertemuan berkala Tim DVI Propinsi Banten	2024	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Memimpin pertemuan berkala
	Hasil monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi (feedback)	2024	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Menerima feedback dan masukan/saran

II. HASIL IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. CAPAIAN HASIL PERUBAHAN

1. Kesesuaian antara Milestone Perencanaan dan Implementasi

Capaian hasil Perubahan pada Proyek Perubahan berjudul “**Strategi DVI Banten Meningkatkan Jalur Koordinasi Dan Kerjasama Kebencanaan Dalam Operasi DVI (Identifikasi Korban Meninggal) Melalui Pembentukan Sub Klaster DVI Dalam Bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS)**” telah dilaksanakan berdasarkan pentahapan/milestone yang direncanakan dengan menyesuaikan waktu dari Mentor, Project Leader, Tim Efektif maupun Stakeholder Internal dan eksternal secara umum berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala-kendala dilapangan yang bisa diselesaikan dengan koordinasi. Adapun implementasi proyek perubahan dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Tahapan/Kegiatan		Rencana Waktu	Realisasi Waktu	% Capaian	Output	Evidence
JANGKA PENDEK							
1.	Usulan rancangan proyek perubahan	Diskusi dengan kabiddokkes	29 Agustus 2022	29 Agustus 2022	100%	Rancangan proyek perubahan	- Dokumentasi - Naskah proper
2.	Terbentuk Rancangan Tim Efektif	Rapat dengan Rancangan Tim Efektif	30 Agustus 2022	30 Agustus 2022	100%	Sprin Rancangan Tim Efektif	- Dokumentasi - Absensi rapat
3.	Penyesunan rancangan proyek perubahan	Menghadap Kabag Kerma roops Polda Banten,	31 Agustus 2022	1 September 2022	100%	Konsultasi dengan Kabag Kerma dan staf beserta team efektif,	- Dokumentasi - Naskah proper -
4.	Sprin Kapolda tentang Mentor	Mengajukan Sprin Kapolda tentang Mentor	31 Agustus 2022	30 Agustus	100%	Sprint Mentor	Sprin Mentor
5.	Pertimbangan Proyek perubahan terhadap stakeholder eksterna BPBD	Menghadap sekretaris BPBD Banten	1 September 2022	13 September 2022	100%	Sekretaris BPBD dan staf beserta team efektif	- Dokumentasi
6.	Penentuan judul proyek perubahan	Menghadap kabiddokkes	2 September 2022	2 September 2022	100%	Kabiddokkes	- Dokumentasi - Naskah Proper
7.	Surat Kapolda tentang undangan rapat lintas sektor	Mengirim surat undangan ke stakeholder eksternal	12 September 2022	4 Oktober 2022	100%	Ka laghar BPBD dan pejabat terkait BPBD, kabag kerma dan team efektif	- Dokumentas - Undangan rapat - Notuleni

8.	Surat perintah Kapolda tentang Tim Efektif	Diskusi dengan Kasubbid Dokpol, Kaur DVI dan staf	13 September 2022	8 September 2022	100%	Sprin tim efektif	- Sprin
9.	Penyusunan konsep sub klaster DVI	Rapat internal team efektif dokkes,	14-17 september 2022	14-15 September	100%	Konsep Perjanjian kerjasama Sub klaster DVI	- Dokumentasi - Absensi - Naskah Konsep PKS
10.	Notulen rapat internal dengan ro ops	Rapat internal dengan biro ops	19-24 September 2022	23 September 2022	100%	Hasil rapat internal	- Dokumentasi - Absensi rapat - Naskah PKS
11.	Notulen rapat internal team efektif	Rapat internal dokkes	26-30 september 2022	26 September 2022	100 %	Konsep Naskah PKS	- Dokumentasi - Absensi rapat - Naskah PKS
12.	Koordinasi dengan kabiddokkes	Menghadap kabiddokkes	1 oktober 2022	3 Oktober 2022	100%	Persetujuan naskah PKS Sub klaster DVI	- Dokumentasi - Naskah PKS
13.	Draft Sub Klaster DVI dengan pihak eksternal	Diskusi dan konsultasi dengan stakeholder eksternal	2-7 oktober 2022	4 Oktober 2022	100%	Rapat Penyusunan draft sub klaster DVI dengan Pihak eksternal	- Dokumentasi - Absensi rapat - Notulen - Naskah PKS
14.	Konsep Draft Sub Klaster DVI	Diskusi dan konsultasi dengan Karoops dan Kabiddokkes	10-11 Oktober 2022	10-11 Oktober 2022	100%	Konsep Draft PKS	- Dokumentasi
15.	Konsep draft Subklaster DVI	Verifikasi draft subklaster DVI ke Bidkum dan Setum	12-21 oktober 2022	8-16 Oktober 2022 17-19 Oktober 2022	100% 100 %	Konsep draft PKS Sub Klaster DVI ke Setum Konsep draft PKS Sub klaster DVI ke Bidkum	- Dokumentasi - Draft PKS
16.	Paparan ke Kapolda	Menghadap Kapolda Banten	24-25 oktober 2022	4 Oktober 2022-	100% -	Paparan Rencana PKS Sub Klaster DVI ke Kapolda Banten yang didelegasikan ke Karo nOps Polda Bante	- Dokumentasi - Draft PKS
17.	Konsep draft subklaster DVI	Diskusi dan konsultasi konsep draft subklaster DVI dengan biro hukum provinsi Banten	26-30 oktober 2022	4 Oktober 2022-	100% -	Koordinasi draft PKS dengan biro hukum Prov Banten	- Dokumentasi - Dokumen PKS
18.	Draft subklaster DVI	Menghadap Kabiddokkes dan Karoops	1 november 2022	3 Oktober 2022	100%	Karoops dan Kabiddokkes	Dokumentasi
	Penandatanganan Subklaster DVI	Kabiddokkes dan Kadinkes Prov. Banten	2 November 2022	27 Oktober 2022	n	PKS Subklaster DVI	- Dokumentasi - Dokumen PKS

	Posko subklaster DVI	Meresmikan Posko DVI	3-4 November 2022	1 November 2022	100%	Tersedianya Posko subklaster DVI	- Dokumentasi - Posko Subklaster DVI
	Sosialisasi HTCK Subklaster DVI	Penerapan HTCK Subklaster DVI	6-10 November 2022	28 – 30 Oktober 2022	100%	Sosialisasi PKS Subklaster DVI	- Dokumentasi - Absensi - Laporan hasil kegiatan
	Sub Klaster DVI	Rapat koordinasi internal dan eksternal	11 November 2022	3-7 November	100%	Koordinasi internal dan eksternal	- Dokumentasi - Absensi - Laporan hasil kegiatan
JANGKA MENENGAH							
1.	PKS Subklaster DVI	Menghadap BPBD	14 November 2022	8 November 2022	100%	Kalaghar BPBD	Penyerahan hasil PKS Subklaster DVI
2.	Sosialisasi Sub Klaster DVI Propinsi Banten	Mensosialisasikan Sub Klaster DVI Provinsi Banten	15 November - Desember 2022	9 November 2022	100%	Sosialisasi PKS ke Dinkes Provinsi Banten	- Dokumentasi - Absensi - Laporan hasil kegiatan
3.	Notulen pertemuan berkala Tim Klaster DVI Provinsi Banten	Pertemuan berkala Tim DVI Propinsi Banten	Januari 2023	-	-	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Memimpin pertemuan berkala
4.	Hasil monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi (feedback)	Februari - Maret 2023	-	-	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Menerima feedback dan masukan/saran
JANGKA PANJANG							
1.	Hasil Penyusunan Sub Klaster DVI Propinsi Banten	Melaksanakan Sub Klaster DVI Provinsi Banten	April 2023	-	-	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Menerima feedback dan masukan/saran
2.	Koordinasi lintas sektoral	Mendorong terbentuknya klaster di BPBD	Mei - September 2023	-	-	Klaster klaster BPBD	Terbentuknya klaster klaster BPBD
3.	Operasi DVI	Sinergitas dan Kerjasama operasi DVI	2023	-	-	Stakeholder internal dan eksternal	Terjalinnnya sinergitas dan Kerjasama dalam operasi DVI
4.	Notulen pertemuan berkala Tim Klaster DVI Provinsi Banten	Pertemuan berkala Tim DVI Propinsi Banten	2024	-	-	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Memimpin pertemuan berkala
5.	Hasil monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi (feedback)	2024	-	-	Stakeholder internal dan eksternal Polri, masyarakat	Menerima feedback dan masukan/saran

Berdasarkan Tabel diatas terdapat kesesuaian antara milestone pada perencanaan dengan implementasi proyek perubahan (realisasi).

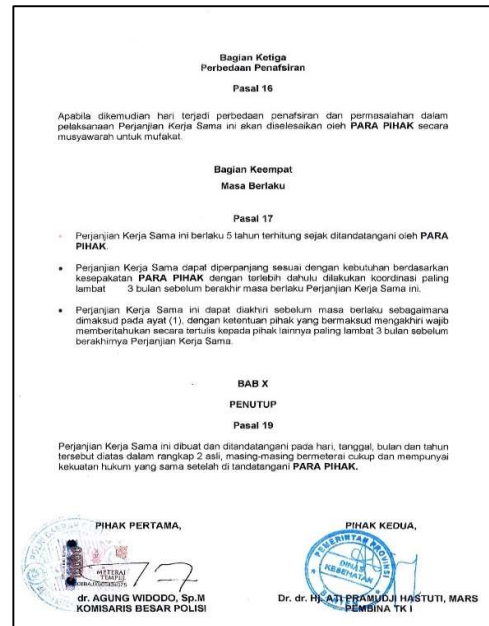
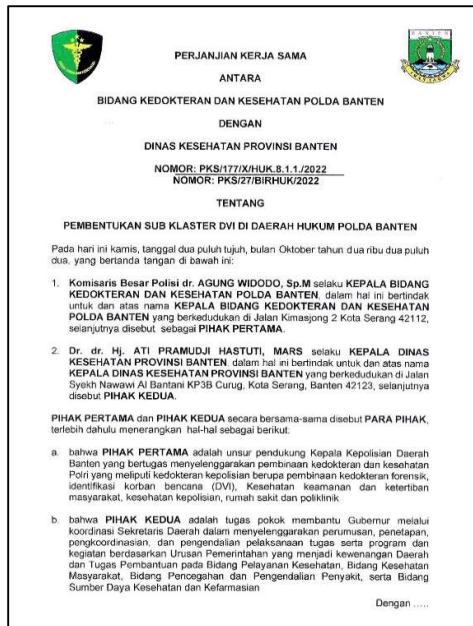
2. Kesesuaian antara Milestone Perencanaan dan Implementasi

Output sebagai hasil dari implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek secara keseluruhan telah tercapai. Beberapa hasil pencapaian proyek perubahan yang telah dilaksanakan yaitu :



- a. Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Sub Klaster DVI di wilayah hukum Polda Banten antara Kepolisian Daerah Banten yang diwakili oleh Kepala Kedokteran dan Kesehatan Polda Banten dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- b. Tersusunnya SOP Sub Klaster DVI yaitu adanya Standar Operasi Prosedur dalam Operasi DVI dimana melibatkan dari berbagai stakeholder internal dan eksternal Polri sehingga proses tujuan Operasi DVI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Terbentuknya Posko Sub Klaster DVI di Biddokkes Polda Banten jalan Ki Masjong 2 Serang 42112;
- d. Pelatihan internal Operasi DVI terlaksana dengan tujuan menerapkan SOP Operasi DVI pada stake holder internal sehingga tercapainya pelaksanaan operasi DVI yang optimal dan efisien;
- e. Pelatihan eksternal Operasi DVI terlaksana dengan tujuan menerapkan SOP Operasi DVI pada stake holder internal sehingga tercapainya pelaksanaan operasi DVI yang optimal dan efisien;
- f. Sosialisasi Sub Klaster DVI ke stakeholder Eksternal Kebencanaan dengan tujuan peningkatan Kerjasama dan penempatan tugas pokok masing masing instansi dalam kebencanaan.
- g. Penyerahan PKS Sub Klaster DVI ke BPBD Provinsi Banten

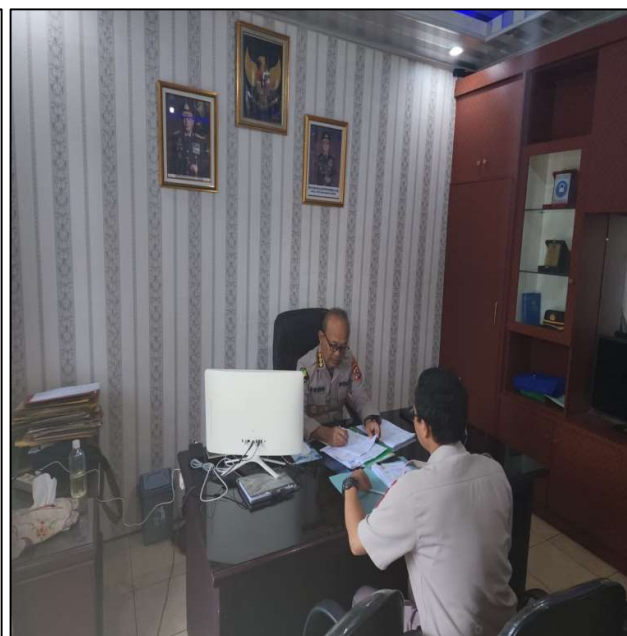
Adapun rincian terhadap pencapaian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Pembentukan Sub Klaster DVI di wilayah hukum Polda Banten antara Kepolisian Daerah Banten yang diwakili oleh Kepala Kedokteran dan Kesehatan Polda Banten dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten.



b. Tersusunnya SOP Sub Klaster DVI yaitu adanya Standar Operasi Prosedur dalam Operasi DVI dimana melibatkan dari berbagai stakeholder internal dan eksternal Polri sehingga proses tujuan Operasi DVI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku;

 PENANGANAN KORBAN MENINGGAL PADA OPERASI DVI			
No. Dokumen : SOP/BK/27/X/KES/2022		No. Revisi :	Halaman : 1 s.d 3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal Terbit : 31-10-2022	Di tetapkan di : Pasca tanggal : KABUDJOKES POLDA BANTEN	
	Tanggal Revisi :	 dr. AGUNG WIDODO, Sp.M KOMISARIS BESAR POLRI KEP 68202527	
Pengertian	Disaster Victim Identification (DVI) adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi korban mati akibat bencana yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh hukum dan ilmiah serta mengacu pada Interpol DVI Guideline		
Tujuan	Yaitu sebagai pedoman Tim DVI dalam melaksanakan tugas pada saat terjadi bencana massal demi terwujudnya sinergitas dalam penanganan korban DVI dengan hasil yang lebih cepat, tepat, akurat, profesional dan proporsional.		
Dasar	Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Banten dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor: PKS/177/X/HUK.8.1.1/2022 dan PKS/27/BIRHUK/2022 tanggal 27 Oktober 2022.		
Prinsip	1. Tim DVI melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Banten dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor: PKS/177/X/HUK.8.1.1/2022 dan PKS/27/BIRHUK/2022 tanggal 27 Oktober 2022; 2. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan satuan kerja (satker) atau fungsi yang lain dan instansi terkait dalam penanganan korban DVI di Provinsi Banten.		
Prosedur	1. Gubernur Banten selalu Kepala Pemerintahan Provinsi Banten mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Darurat Bencana guna kelancaran proses penanganan korban DVI di Provinsi Banten; 2. Kapolda Banten selalu penanggung jawab penanganan korban DVI menerbitkan surat perintah kepada personil yang terlibat dalam penanganan korban DVI di Provinsi Banten; 3. Karo Ops Polda Banten memimpin dan mengarahkan pelaksanaan operasional dalam penanganan korban DVI di Provinsi Banten; 4. Dirsekminum Polda Banten memberikan bantuan penanganan identifikasi korban dengan menggunakan identifikasi pemetaan sidik jari Jenazah terkait dalam penanganan korban DVI di Provinsi Banten; 5. Dirbinmas Polda Banten memberikan bantuan dalam pengumpulan data Anem Mortem, data orang hilang, penghubung keluarga korban melalui Bhabinkamtibmas dalam penanganan korban DVI di Provinsi Banten;		



- c. Terbentuknya Posko Sub Klaster DVI di Biddokkes Polda Banten jalan Ki Masjong 2 Serang 42112;



- d. Pelatihan internal Operasi DVI terlaksana dengan tujuan menerapkan SOP Operasi DVI pada stake holder internal sehingga tercapainya pelaksanaan Operasi DVI yang optimal dan efisien;



- e. Pelatihan eksternal Operasi DVI terlaksana dengan tujuan menerapkan SOP Operasi DVI pada stake holder internal sehingga tercapainya pelaksanaan operasi DVI yang optimal dan efisien;



- f. Sosialisasi Sub Kluster DVI ke stakeholder Eksternal Kebencanaan dengan tujuan peningkatan Kerjasama dan penempatan tugas pokok masing masing instansi dalam kebencanaan;



g. penyerahan PKS Sub Klaster DVI ke BPBD Prov Banten



B. MANFAAT

1. Manfaat Internal

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dengan membantu identifikasi korban bencana massal;
- b. Memberikan payung hukum bagi internal kepolisian dalam melaksanakan tugas identifikasi korban meninggal karena bencana dalam Operasi DVI;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar fungsi atau satker internal Polri yang terkait penanganan korban bencana massal;
- d. Memberikan kepercayaan diri kepada team DVI dalam bertindak dan bekerja dalam penanggulangan bencana dalam Operasi DVI;
- e. Meningkatkan motivasi kinerja stakeholder internal Polri.

2. Manfaat Eksternal bagi Masyarakat dan Stakeholders

- a. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar Instansi/Dinas yang terkait penanganan korban bencana massal;
- b. Meningkatkan motivasi kinerja stakeholder eksternal Polri;
- c. Mempermudah koordinasi antar Instansi atau Dinas;
- d. Memberikan pelayanan masyarakat dalam menentukan identifikasi korban bencana massal;
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan korban bencana massal.

C. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN STRATEGIS

Kepemimpinan strategis sangat diperlukan pada proses implementasi proyek perubahan sehingga proyek perubahan yang telah digagas berjalan lancar dan output tercapai maksimal. **Project Leader** sejak awal telah melaksanakan pemetaan situasi dan peluang yang ada agar koordinasi serta kolaborasi berjalan maksimal guna keberhasilan proyek perubahan.

Langkah strategis yang tanggap terhadap kemungkinan situasi yang terjadi telah diupayakan oleh project leader dalam rangka pencapaian tujuan proyek perubahan agar berjalan efisien dan efektif. Langkah-langkah tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan pendampingan kepada pendukung implementasi proyek perubahan

a. Mentor

Pada saat awal pelaksanaan proyek perubahan, *Project leader* menghadap mentor untuk mendapatkan dukungan dalam proses implementasi proyek perubahan. Project leader menjelaskan secara detail kondisi saat ini dan manfaat implementasi proyek perubahan terhadap organisasi Polri, stakeholder dan Masyarakat umum.

Project leader selalu melibatkan mentor dalam pelaksanaan milestone kegiatan.





b. Coach

Koordinasi dengan coach dilakukan oleh project leader dengan intens meski terkendala ruang dan waktu. Bimbingan dengan coach dalam rangka kelancaran implementasi proyek perubahan dilakukan dengan cara melalui whatsapp dan zoom meeting.

c. Tim efektif

Jadwal implementasi proyek perubahan terkadang berbenturan dengan padatnya rutinitas tupoksi utama tim efektif. Project leader melaksanakan pendekatan secara intens dan personal kepada tim efektif dan berperan aktif membimbing tim efektif dalam membantu kelancaran pelaksanaan proyek perubahan. Project leader juga berkoordinasi dengan atasan langsung tim efektif agar anggotanya dapat membantu pelaksanaan proyek perubahan.



d. Narasumber

Narasumber memiliki jadwal yang sangat padat sesuai dengan rutinitas tupoksi pekerjaannya. Mengatasi kondisi tersebut, project leader selalu instens berkoordinasi dengan para narasumber. Selain itu pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal dan kesibukan narasumber.



e. Stakeholder

Project leader berkoordinasi dengan para stakeholder guna kelancaran pelaksanaan implementasi proyek perubahan. Koordinasi dilakukan baik tatap muka maupun media komunikasi. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholder internal maupun eksternal dilakukan intensif karena keterbatasan waktu dan kegiatan para stakeholder yang padat.





2. Memimpin rapat

Project leader memimpin rapat tim efektif. Hal dimaksudkan agar tim efektif memiliki persamaan persepsi terkait implementasi proyek perubahan. Selain itu, rapat dengan tim efektif dilakukan untuk memonitor sejauh mana perkembangan pelaksanaan implementasi proyek perubahan.



3. Memobilisasi stakeholder

Mobilisasi stakeholder sebagai bentuk kepemimpinan strategis sangat diperlukan guna mendukung implementasi proyek perubahan. Project leader menggunakan strategi komunikasi untuk menggerakkan stakeholder agar mendukung proyek perubahan yang digagas oleh project leader. Stakeholder yang terkait dengan proyek perubahan terdiri dari:

- a. Stakeholder internal
 - 1) Kapolda Banten
 - 2) Irwasda Polda Banten
 - 3) Karo Ops Polda Banten
 - 4) Karo SDM Polda Banten
 - 5) Karo Sarpras Polda Banten

- 6) Dir Krimum Polda Banten
- 7) Dir Samapta Polda Banten
- 8) Dir Polairud Polda Banten
- 9) Kasat Brimob Polda Banten
- 10) Kabidkum Polda Banten
- 11) Kasetum Polda Banten

b. Stakeholder eksternal

- 1) Gubernur
- 2) Ka BPBD Provinsi Banten
- 3) Ka Dinkes Provinsi Banten
- 4) Ka Dinsos Provinsi Banten
- 5) Ka Biro Hukum Provinsi banten
- 6) PDFI;
- 7) AHLI FORENSIK

Stakeholders adalah perorangan maupun kelompok yang tertarik, baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, yang berpengaruh maupun terpengaruh oleh tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan suatu tim (Michael West, 1998; 66). Pada proyek perubahan ini, telah teridentifikasi stakeholders terkait baik internal maupun eksternal berdasarkan pengaruh dari masing-masing stakeholders, sebagai berikut :

1. Stakeholders yang memiliki kepentingan besar terhadap proyek perubahan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (Promotors)
 - Kapolda; Karoops; Kabidkum; Kabiddokkes; Kasetum; Kabagkerma; Kasubbiddokpol;
 - Kadinkes Provinsi Banten; Ka BPBD Provinsi Banten; Biro Hukum Provinsi.
2. Stakeholders yang memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi proyek perubahan (Defendents)
 - Itwasda; Karo SDM; PDFI; AHLI FORENSIK.

3. Stakeholders yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam proyek perubahan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi proyek perubahan jika mereka menjadi tertarik (Latents);
 - Gubernur; Kadinkes; Direktur RS; TNI AL; TNI AD; Ka BPBP Kota/Kab;
 - Kadinkes Kota/Kab; Dinsos; Setda Prov; KKP; Dishub; Disdukcapil;
 - Dirpolair; Karosarpras; Dirkrimum; Dirsabhara; Dirlantas; Dirbinmas;
 - Kasatbrimob; Kabidhumas; Kapolres.

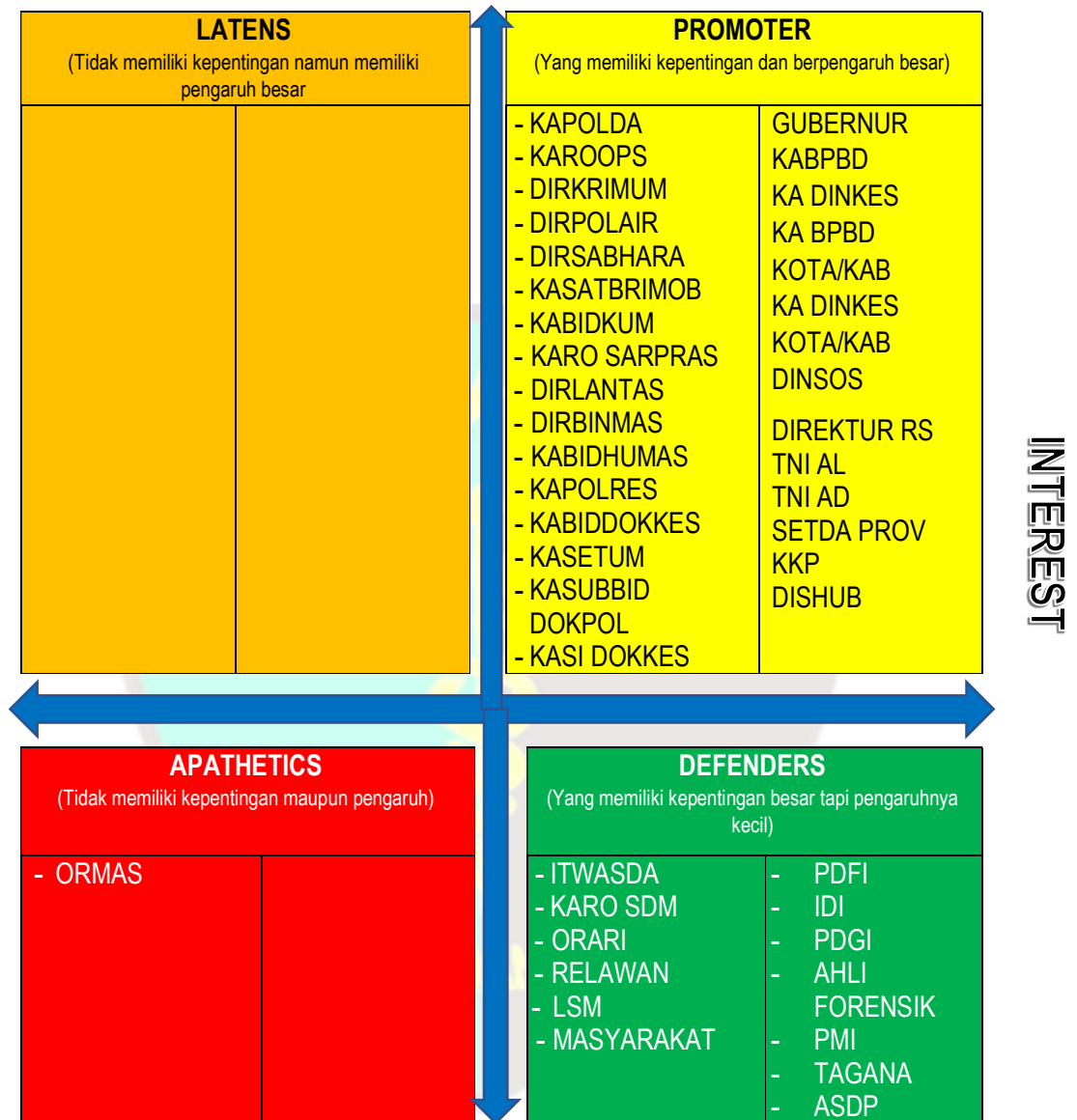
4. Stakeholders yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahwa mungkin tidak mengetahui adanya proyek perubahan (Apathetics)

Mobilisasi stakeholder terlihat dalam gambar berikut :



SESUDAH IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PENGARUH



Setelah dilakukan komunikasi efektif, stakeholder pada kuadran promoter dan defender memberikan dukungan serta mengapresiasi implementasi proyek perubahan.

4. Melaksanakan strategi manajemen perubahan dalam mengatasi kendala dan permasalahan

Pelaksanaan implementasi proyek perubahan tidak selalu berjalan mulus. Risiko yang muncul selama implementasi proyek perubahan dihadapi project leader dengan menerapkan strategi manajemen perubahan. Strategi ini

diperlukan untuk mengatasi penolakan beberapa pihak terhadap implementasi proyek perubahan.

No	Obyek	Hambatan	Strategi
1.	Mentor	Padatnya kegiatan tugas rutin Mentor, mempengaruhi terhadap konsultasi yang akan dilakukan oleh <i>Project Leader</i> selama pelaksanaan Proyek Perubahan	Koordinasi secara tatap muka dilaksanakan pada saat mentor tidak ada kegiatan, dan menggunakan teknologi digital chat whatsapp maupun telepon langsung jika mentor sibuk.
2.	Stakeholder	Padatnya kegiatan stakeholder, sehingga menjadi sedikit kendala dalam membangun jaringan komunikasi dengan <i>stakeholders</i> pada saat proses pelaksanaan serta implementasi dan sosialisasi proyek perubahan	Koordinasi secara tatap muka dilaksanakan pada saat stakeholder tidak ada kegiatan, dan menggunakan teknologi digital chat whatsapp maupun telepon langsung jika stakeholder sibuk.
3.	Tim Efektif	Personel yang tergabung dalam Tim Efektif memiliki tugas dan kewajiban sebagai personel organik di Biddokkes, Biro Ops, Bidkum, Setum, Dinkes dan BPBD sehingga dapat mempengaruhi terhadap proses pelaksanaan proyek perubahan yang sedang dilaksanakan	Jadwal implementasi disesuaikan dengan pekerjaan tim efektif dengan tidak menyampingkan timeline milestone; Melaksanakan komunikasi dengan atasan tim efektif Melakukan pendekatan secara personal dengan tim efektif agar dapat meluangkan waktu untuk pelaksanaan proper
4.	Anggaran	Pelaksanaan proyek perubahan tidak didukung oleh anggaran dinas	Mengoptimalkan kegiatan proyek perubahan disesuaikan dengan pelaksanaan tupoksi sehari hari project leader serta mengusulkan anggaran di anggaran perubahan yang ada di anggaran DIPA
5.	inisiatif, inovasi dan kreatifitas	Kurangnya inisiatif, inovasi dan kreatifitas dari tim efektif yang terlibat	Membimbing dan memberikan pencerahan tentang inisiatif, inovasi dan kreatifitas agar tim efektif mampu menyelesaikan kegiatan proyek perubahan
6.	Jadwal Stakeholder internal dan eksternal	Sulitnya menyesuaikan jadwal stakeholder-stakeholder dengan tim efektif dalam hal koordinasi, konsultasi dan diskusi tentang proyek perubahan	Koordinasi secara tatap muka dilaksanakan pada saat stakeholder tidak ada kegiatan, dan menggunakan teknologi digital chat whatsapp maupun telepon langsung jika stakeholder sibuk
7.	Sarana dan Prasana	Sarana dan prasarana tidak mendukung	Sarana prasana yang dimiliki oleh Project leader, Dokkes, Roops, BPBD dan Dinkes digunakan seoptimal mungkin
8.	Dukungan dan Motivasi	Kurangnya dukungan dan motivasi dari stakeholder terhadap rencana proyek	Memberikan pencerahan tentang maksud dan tujuan pembuatan proyek perubahan agar seluruh

		perubahan	stakeholder memberikan dukungan dan motivasi
9.	Kesepahaman stakeholder tentang penyusunan draft sub kluster DVI	Kurangnya kesepahaman stakeholder internal maupun eksternal Polri pada saat penyusunan draft subklaster DVI untuk Operasi DVI	Memberikan maksud dan tujuan pembuatan proyek pembuatan dan hasil produknya agar stake holder mengerti dan paham maksud pembuatan penyusunan draft sub kluster DVI tersebut

D. IMPLEMENTASI STRATEGI MARKETING

Dalam rangka mewujudkan peningkatan jalur koordinasi dan Kerjasama kebencanaan dalam operasi DVI (identifikasi korban meninggal) melalui pembentukan Subklaster DVI dalam bentuk perjanjian kerja sama (PKS) dilakukan beberapa strategi marketing agar memiliki daya customer. Kegiatan ini akan menjadi awal terjalannya kerjasama yang optimal sehingga dalam penanganan Operasi DVI berjalan dengan lancar dan optimal sesuai dengan harapan masyarakat yaitu teridentifikasinya salah satu keluarga mereka. Adapun Langkah-langkah strategi marketing dengan menggunakan teori 4P1C (Pruduct, Price, Place, Promotion and Customer) yaitu :

NO	VARIABEL	KETERANGAN
1.	Product (Produk)	Hasil yang dicapai adalah adanya PKS Subklaster DVI, Posko DVI dan SOP DVI sehingga dapat diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam penanganan Bencana di Provinsi Banten.
2.	PRICE (Harga)	Peningkatan Kerjasama kebencanaan terutama di Proses identifikasi korban bencana massal bisa terlaksana secara cepat, tepat, akurat dan professional dengan adanya pembentukan Perjanjian Kerja Sama Sub Klaster DVI dan SOP penanganan korban meninggal
3.	PLACE (Tempat)	Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara : a. Biddokkes, Roops, BPBD dan Dinkes; b. Posko Sub Klaster DVI



		
<p>4.</p>	<p>PROMOTION (Promosi)</p> 	<p>a. Sosialisasi Subklaster DVI kepada stakeholder eksternal melalui mengikuti undangan rapat dan menyampaikan adanya PKS Subklaster DVI;</p> <p>b. Posko DVI;</p> <p>c. Melaksanakan pelatihan dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal;</p> <p>d. Promosi di media Sosial</p> 
<p>5.</p>	<p>COSTUMER (Pengguna/Pelanggan)</p>	<p>Polri, Dinas Kesehatan, BPBD, Dinas Sosial, Klaster kebencanaan, dan Masyarakat Umum</p>

E. KEBERLANJUTAN

Project leader Bersama-sama dengan pimpinan Polri wilayah hukum Polda Banten telah berusaha dan berupaya untuk membuat hasil proyek perubahan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan karena proyek perubahan memberikan manfaat bagi Organisasi Polri khususnya Polda Banten dan stake holders dalam rangka mengungkap identitas korban bencana meninggal yang akurat, efisien dan akuntabel. Pembentukan Sub Klaster DVI ini diharapkan bisa memposisikan diri untuk bertindak, bekerja dan membantu dalam proses bencana sehingga DVI dapat bekerja secara efektif, efisien dan akurat. Sub Klaster DVI diharapkan dapat bekerja bila terjadi bencana dibantu oleh Stakeholder internal dan eksternal.

Terkait dengan keberlanjutan proyek perubahan, diharapkan Bersama BPBD terbentuknya klaster klaster Kebencanaan yang lain, sehingga tupoksi klaster dapat bekerja secara tepat dan akurat dalam membantu korban bencana, selain itu telah dibuat rencana rapat koordinasi stakeholders internal dan eksternal dalam peningkatan jalur koordinasi dan Kerjasama kebencanaan dalam operasi DVI (identifikasi korban meninggal) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Subklaster DVI dan pembuatan Standar Operasional Prosedur(SOP) penanganan korban meninggal sehingga akan mampu lebih berkoordinasi dalam penanganan bencana terutama di Provinsi Banten.

F. PEMBERDAYAAN ORGANISASI PEMBELAJAR

Sering terjadinya bencana alam di wilayah hukum Polda Banten dan mengakibatkan korban meninggal, mengharuskan seluruh stakeholder yang terlibat harus berkoordinasi dan Kerjasama kebencanaan agar pengungkapan korban bencana alam yang meninggal dapat akurat, efisien dan akuntabel.



1. *Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi*

Sumber daya sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan rencana proyek perubahan ini sehingga pelaksanaan implementasi rencana proyek perubahan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan responsif terhadap situasi apapun. Adapun sumber daya pendukung rencana proyek perubahan, yaitu:

a. **Sumber daya manusia**

Komponen Sumber Daya Manusia pendukung rencana proyek perubahan sebagai berikut:

- 1) Mentor;
- 2) Coach;
- 3) Project Leader;
- 4) Tim efektif;
- 5) Narasumber;
- 6) Stakeholders internal dan eksternal.

b. **Sarana Prasarana**

Seluruh pelaksanaan implementasi proyek perubahan didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Biddokkes Polda Banten, Biro Operasi Polda Banten, Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Polda Banten, BPBD provinsi Banten, dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

c. **Anggaran**

Implementasi proyek perubahan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Melalui koordinasi dengan pimpinan Biddokkes Polda Banten, pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sub Klaster DVI bisa terlaksana dengan menggunakan anggaran Dinas (melalui perubahan anggaran DIPA Biddokkes) dan Pribadi.

d. Jejaring

Implementasi proyek perubahan melaksanakan koordinasi dengan menggunakan jejaring melalui staf yang membidangi kebencanaan di wilayah provinsi Banten.

2. Pelaksanaan Strategi Pengembangan Kompetensi

Sumber daya organisasi khususnya sumber daya manusia pendukung implementasi proyek perubahan harus dioptimalkan kompetensinya, sehingga proyek perubahan dapat secara maksimal dilaksanakan. Project leader berusaha memberikan pengembangan kompetensi terhadap para pendukung proyek perubahan sebagai berikut :

NO	SDM	STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	WAKTU
1.	Tim Efektif	Pelaksanaan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama dan SOP penanganan korban meninggal	2 Nov 2022
2.	Internal	Pelaksanaan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama dan SOP penanganan korban meninggal	3 Nov 2022
3.	Eksternal	Pelaksanaan Sosialisasi Perjanjian Kerja Sama dan SOP penanganan korban meninggal a. PMI provinsi Banten b. Dinas Kesehatan c. Stakeholder eksternal	4 Nov 2022 7 Nov 2022 9 Nov 2022

Project leader berusaha untuk mengembangkan kompetensi diri dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. seminar membangun Kerjasama yang strategis dengan instansi lain untuk menuju polri yang presisi



kegiatan seminar ini dilaksanakan oleh jogja Smart Indotama training dan consultan bekerjasama dengan Polri. Pemberi materi pada seminar ini adalah dr. Nurus Sa'adah, S.Psi, M.Si., Psikolog, beliau adalah praktisi psikologi didalam dunia kerja yang banyak berkecimpung didalam pengelolaan Kerjasama organisasi.

Dalam seminar seminar membangun Kerjasama yang strategis dengan instansi lain untuk menuju polri yang presisi penyaji seminar menyampaikan tentang tatacara membuat Kerjasama yang strategis Polri dengan instansi lain, di seminar ini banyak sekali ilmu yang diambil terutama buat proyek perubahan project leader yaitu tentang proses pembuatan Perjanjian Kerjasama Biddokkes dengan Dinkes, selain itu materi yang diberikan terkait tentang pola pikir dan strategi project leader dalam Menyusun perjanjian Kerjasama. Dalam kesempatan seminar banyak info tentang tatacara pembuatan Kerjasama yang efektif dan sesuai standart, bagaimana pola pola Kerjasama dengan instansi lain dan cara pendekatan dalam penyamaan persepsi di pola kerja sama. Untuk melakukan pola Kerjasama dengan imstansi lain diperlukan pendekatan pendekatan program dari awal yaitu dengan pertemuan awal untuk menyamakan persepsi, namun dalam penyamaan persepsi pasti ada perbedaan, didalam seminar ini penyaji memberikan suatu Teknik dan cara jitu dalam membahas persamaan persepsi sehingga diantara para pihak tidak ada yang dirugikan dan perjanjian Kerjasama ini akan sifatnya saling menguntungkan.

b. Seminar konseptualisasi dan penyusunan indeks profesionalitas anggota polri



Seminar ini banyak berbicara tentang profesionalisme anggota polri terutama dalam bekerja dan bertindak di dalam organisasi. Workshop yang diadakan oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri ini diadakan selama 3 hari pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 2 September 2022 di Jakarta. Materi diberikan oleh beberapa narasumber yang berasal dari internal Polri maupun eksternal Polri yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB.

Materi hari pertama disampaikan dari BKN dengan judul Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kemudian dilanjutkan oleh narasumber dari internal Polri Kombes Pol Dr. Kif Aminanto, S.I.K., S.H., M.H. dengan materi Konseptualisasi Dan Penyusunan Indeks Profesionalitas Anggota Polri. Hari kedua dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai Konsepsi Kinerja Sebagai Bagian Dari Indeks Profesionalitas Sumber Daya Manusia oleh narasumber Kombes Pol Pungky Bhuana Santoso, S.H., S.I.K., M.Si. Materi selanjutnya diberikan oleh Raria Meliala, S.Si., M.M., seorang analis kebijakan ahli muda Kementerian PANRB. Materi yang diberikan adalah Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding sebagai Bagian dari Strategi Akselerasi Transformasi Menuju Birokrasi Profesional dan Berkelas Dunia. Hari ketiga materi diberikan oleh Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri, Kombes Pol Agoes Soejadi Soepraptono, S.I.K. Materi yang diberikan adalah Konsep Penyusunan Indeks Profesionalitas Anggota Polri.

Kesimpulan dari materi yang diberikan oleh seluruh narasumber adalah perubahan lingkungan strategis saat ini menuntut kemampuan baik Polri maupun PNS untuk adaptif terutama pada dimensi profesionalitas sumber daya manusia

yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Profesionalitas itu sendiri dimaknai sebagai kualitas sikap, derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Selain itu, perlu adanya suatu transformasi baik transformasi struktural, kultural maupun digital. Transformasi tersebut memerlukan adaptasi kebijakan dan kompetensi serta adopsi teknologi dan sistem yang efektif. Para pegawai di era industri 4.0 harus memiliki skill, knowledge, attitudes, value yang mampu memahami isu lokal, global dan antar budaya. Salah satu kompetensi profesional spesialis pada era modern harus mampu mengembangkan teknologi inovatif dan mampu berpikir digital untuk otomatisasi proses sehari-hari. Sehingga dalam proyek perubahan seorang project leader harus mampu membawa perubahan organisasi yang lebih baik dengan melihat kondisi SDM, sarana dan prasarana serta teknologi sehingga dapat mentransformasikan proyek perubahan itu kearah peningkatan kapabilitas organisasi.

- c. Seminar Internasional Man Made Disaster : Potential, Risk and Recent Management, 20 years later the commemoration of the 1ST Bali Bombing



Seminar internasional Man Made Disaster : Potential, Risk and Recent Management, 20 years later the commemoration of the 1ST Bali Bombing dilaksanakan secara online oleh universitas hasanudin yang bekerjasama dengan PDFI dan IPOFI. Materi tersebut dibawakan oleh para ahli ahli forensic dari perwakilan negara yaitu dari Australia

(Prof. Stephen Cordner, Prof. Ricard Basset, Dr. Alanah Buck, Dr. Stephen Knott, OAM, Dr. Meiya Sutisno., B.Sc (Hons)., Ph.D(Med) dan Dr. Clive Cooke), narasumber dari jepang (Prof. Masatsugu Hashimoto) dan narasumber dari Indonesia (Peter Sahelangi, drg., Sp. OF (K)., DFM Senior Supt (Ret).

Kesimpulan dari Materi yang diberikan terkait dengan tatacara management kejadian peristiwa bom bali yang pertama, dimana kejadian tersebut banyak korban jiwa terutama korban jiwa warga negara asing. Di kejadian bom bali satu banyak peristiwa yang crowded dalam artian management bencana waktu itu masih belum terlalu bagus, banyak yang bertindak secara sendiri sendiri dan diperparah lagi dengan kondisi adanya warga asing yang terdampak, sehingga perwakilan dari negara mereka menurunkan tim DVI ke bali untuk membantu menanggapi identifikasi korban meninggal. Di dalam seminar ini digambarkan situasi yang crowded dalam penanganan DVI sehingga banyak suatu ilmu Management DVI yang direkomendasikan yaitu dengan pembagian tugas -tugas dari berbagai fase fase DVI sehingga para tim DVI bekerja sesuai dengan keahliannya dan dapat menghasilkan suatu identifikasi jenazah yang tepat dan akurat.

Materi yang diberikan ini sangat bermanfaat bagi Project Leader dalam Menyusun Proyek Perubahan tentang bagaimana membuat pola Management dalam penanganan Bencana, rekomendasi Polda management tersebut dapat diimplementasikan dalam proyek perubahan sehingga timDVI yang akan bekerja di dalam Operasi DVI dapat bekerja di fase fase DVI sesuai dengan

keilmuannya. Dan diharapkan pola tersebut dapat membantu masyarakat yang terdampak bencana terutama korban meninggal yang susah diidentifikasi dapat segera teridentifikasi secara tepat dan akurat.

- d. Seminar Internasional how to write a systematic literature review paper and how to present a scientific publication and trick to reponse the reviewers comment



Seminar Internasional how to write a systematic literature review paper and how to present a scientific publication and trick to reponse the reviewers comment ini dilaksanakan selama 5 kali pertemuan di setiap hari Rabu jam 13.00-16.00 wib oleh pembicara internasional dan nasional yaitu Dhanon Sarwo Utomo, Ph.D dari Herriot Watt University United Kingdom dan pembicara Nasional yaitu Prof. Dr. Sukono, M.M.,M.Si dan Prof. Dr. Asep K Supriatna, M.S dari Universitas Padjajaran.

Kesimpulan Materi yang diberikan terkait dengan tatacara penulisan karya tulis ilmiah terutama karya karya penulisan yang berhubungan dengan dunia akademisi. Disampaikan bahwa karya tulis ilmiah itu harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dapat digunakan oleh masyarakat hasil karya tulis tersebut, selain itu karta tulis harus bisa membawa dapat positif kepada masyarakat dalam kehidupan sehingga karya tulis tersebut tidak sia-sia. Untuk membuat karya tukis ilmiah harus memperhatikan aspek aspek norma pada masyarakat yang berlaku sehingga hasil karya tulis tidak membuat suatu kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini penulis harus bisa melihat peluang yang ada di masyarakat untuk menjadikan masyarakat tersebut jadi lebih baik.

Materi yang diberilan ini sangat bermanfaat bagi project leader dalam Menyusun rumusan Proyek perubahan, dimana gagasan yang diperoleh harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan karya tulis ilmiah ini dapat membantu masyarakat dan organisasi kepolisian dalam penanganan kebencanaan terutama penanganan Identifikasi korban meninggal. Karena penangan identifikasi yang benar dan tepat sangat membantu masyarakat dalam mencari keluarganya yang hilang dan meninggal karena bencana. Selain itu project leader dapat mengetahui tatacara penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai standart baku internasional dan menyesuaikan dengan standart dari LAN dan Pusdikmin.

- e. seminar peran saksi ahli dalam dugaan malpraktek dokter



seminar peran saksi ahli dalam dugaan malpraktek dokter ini dilaksanakan secara online oleh para ahli hukum Kesehatan dimana keynote speaker adalah Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto, SH., MH dan Kapusdokkes

Polri Irjen Pol dr. Asep Hendradiana, Sp. An.KIC., M. Kes. Narasumber pemateri adalah dr. Slamet Budiarto, SH., MH. Kes, Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH, Dr. Arief Muliawan, SH., MH, dr. I Gusti Gede M. Andika, Sp. Rad, dr. Daeng Faqih, SH., MH, dan dr. Juliana Susanti Gunawan, MH.Kes CMC.

Kesimpulan dalam seminar ini adalah tentang bagaimana penentuan hukum bagi kasus dugaan malpraktek dokter. Dimana banyak rekan rekan sejawat yang kadang kala mengabaikan proses dalam pengobatan kepada masyarakat sehingga menimbulkan dugaan malpraktek. Pada dasarnya dokter adalah manusia yang berusaha untuk membantu pasien untuk menyembuhkan penyakitnya namun dalam hal ini ketentuan lain bisa terbalik, namun bila seorang dokter dapat melengkapi bukti administrasi maka kejadian malpraktek tidak akan terjadi atau hal itu tidak sengaja dibuat karena keterbatasan dokter sebagai manusia. Namun dalam hal ini bisa dilakukan mediasi sebelum jatuhnya hukuman ke dokter dengan cara mencari solusi jalan keluar yang sesuai dengan persetujuan pasien dan dokter dan ini sifatnya saling membantu dan mendapatkan jalan perawatan lanjutan bagi pasien. Dalam materi ini juga disampaikan bahwa seorang dokter harus mau menjadi dokter pemeriksa luar jenazah dan visum bila dimintakan oleh penyidik, hal ini berhubungan erat dengan tugas dokter sebagai tenaga medis yang menyatakan jenis jenis luka yang terjadi di pasien dan menentukan apakah pasien tersebut sudah meninggal atau belum sehingga bila keadaan sudah meninggal dapat diketahui apakah pasien tersebut meninggal secara wajar atau karena hal lain yang mencurigakan, dan akhirnya kalo kematian tersebut mencurigakan diharapkan sejawat dapat merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis forensic untuk dilakukan otopsi untuk mencari sebab-sebab kematian demi kepentingan penyidikan.

Dari materi ini project leader dapat mengambil kesimpulan dalam bertindak seseorang atau organisasi harus mempunyai panyung hukum, sehingga segala prosedur yang tidak sesuai dapat di minimalisir. Dalam proyek perubahan ini project leader mengambil pelajaran bahwa Sub Klaster DVI sangat dibutuhkan sebagai payung hukum dalam bertindak untuk mengidentifikasi korban meninggal, sehingga bila ada complain dari masyarakat kita sudah memiliki SOP dan PKS Sub Klaster DVI yang memadai.

G. KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN

Project leader mengikuti beberapa mata pelatihan pilihan untuk mendukung implementasi proyek perubahan. Mata pelatihan tersebut secara optimal dan tepat digunakan oleh project leader. Melalui keikutsertaan mata pelatihan pilihan tersebut, project leader memiliki pengetahuan yang mampu mendukung implementasi proyek perubahan secara menyeluruh.

Mata pelatihan pilihan yang diikuti sebagai berikut:

1. Manajemen pemerintahan

Dalam modul pembelajaran manajemen pemerintahan menuliskan bahwa masa revolusi industry 4.0 saat ini ditandai dengan perubahan cepat dalam semua lini kehidupan masyarakat yang didukung perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perubahan ini melahirkan berbagai tuntutan masyarakat dan penyesuaian paradigma administrasi pemerintahan. Pemerintahan daerah harus dapat menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan professional sesuai dengan perkembangan industry 4.0. Biddokkes Polda Banten sebagai bagian dari pemerintahan pun tidak terlepas dari imbas revolusi industry 4.0. Salah satu upaya menyikapi kondisi tersebut, project leader melakukan implementasi proyek perubahan guna meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam operasi DVI (korban bencana meninggal). Materi pada mata pelatihan ini sangat relevan dengan implementasi proyek yang sedang dikerjakan.

2. Manajemen Keuangan Negara

Perencanaan kegiatan satuan kerja harus mencerminkan tugas fungsi Kementerian/Lembaga serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Kementerian/Lembaga. Salah satu konsep yang baik dalam rangka membuat perencanaan yang baik adalah logic model, yaitu memberikan gambar lengkap kepada stake holder dengan road map yang menguraikan keterkaitan Langkah-langkah atau Tindakan yang dilakukan agar program yang telah direncanakan mampu mencapai tujuan yang

diharapkan (Madjid, 2022). Materi ini sejalan dengan implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan oleh project leader.

3. Kepemimpinan Digital

Pemanfaatan teknologi informasi diberbagai bidang sangat membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seiring dengan perkembangan revolusi industry 4.0 dan revolusi pemerintahan 4.0 menjadi dasar transformasi pada pemerintahan dalam mengadopsi penggunaan teknologi. Di harapkan dengan adanya bantuan teknologi informasi akan mempermudah dan mempercepat pemberian layanan. Kepemimpinan digital merupakan sebuah kombinasi gaya kepemimpinan serta pemanfaatan teknologi digital (rochmansjah & Karno, 2020). Kepemimpinan digital benar-benar diperlukan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan tupoksi Ur DVI Biddokkes Polda Banten serta membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah salah satu bidang yang mendapat perhatian sangat besar oleh PBB. Piagam PBB menegaskan bahwa salah satu tujuan PBB adalah menggalang suatu kerjasama internasional untuk mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa adanya perbedaan pada ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Badan-badan yang termasuk dalam organ utama PBB yaitu Majelis Umum dan Dewan Ekonomi dan sosial. Majelis Umum telah membentuk Dewan HAM Perserikatan Bangsa- Bangsa yang bekerja untuk memajukan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Dewan Ekonomi Sosial adalah salah satu organ utama PBB yang kewenangannya, hampir secara keseluruhan masuk ke dalam bidang Hak Asasi manusia. Dewan Ekonomi dan Sosial dapat membentuk komisi yaitu komisi di bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan hak-hak asasi manusia. Komisi komisi ini bekerja dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi-komisi yang dimaksud adalah:

- Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- Sub Komisi Untuk Pemajuan dan Perlindungan HAM;
- Komisi Tentang Status Wanita;
- Komisi Tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana.

Jadi dalam Hak Asasi Manusia adalah hak asasi dasar bagi setiap manusia, tidak lain juga jenazah mempunyai hak asasi untuk dikenali sehingga jenazah tersebut bisa dikembalikan ke keluarganya untuk diperlakukan secara layak dalam hal pemakaman.

H. LESSON LEARNT

Materi pembelajaran selama mengikuti kegiatan PKN II terimplementasikan dalam pelaksanaan proyek perubahan, yaitu:

1. Tahapan/milestone yang dilaksanakan memerlukan kepemimpinan yang mampu membangun dinamika yang baik, berintegritas dan mampu menyalurkan energi yang positif ke lingkungan sekitarnya.
2. Menjawab dinamika perkembangan lingkungan strategis, dalam pelaksanaan implementasi proyek perubahan sangat diperlukan jiwa kepemimpinan kewirausahaan dimana project leader harus mampu menangkap peluang-peluang yang ada dan berani mengambil resiko dalam menghadapi kondisi perubahan yang sangat cepat serta mengelolanya dengan baik.
3. Project leader dan sumber daya manusia pendukung implementasi proyek perubahan harus melek teknologi karena kondisi saat ini memerlukan pendayagunaan instrument digital secara maksimal agar organisasi berjalan lebih efisien.
4. Project leader mengimplentasikan manajemen strategis dalam menghadapi isu strategis yang ada terkait penanganan bencana terutama identifikasi korban meninggal yang kurang maksimal dan salah satu solusinya adalah dengan akselerasi peningkatan kemampuan.
5. Project leader melakukan langkah strategi marketing terhadap implementasi proyek perubahan dengan menggunakan variabel 4P1C.

III. PENUTUP

SIMPULAN

Peningkatan koordinasi dan kerjasama kebencanaan dalam operasi DVI telah semakin padu setelah Perjanjian Kerja Sama Sub Klaster DVI telah di setujui Oleh Kabiddokkes Polda Banten dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan korban meninggal telah dibuat sehingga Penanganan Korban meninggal akibat bencana di wilayah hukum Banten di harapkan kerjasama seluruh stakeholders yang terlibat dalam penanganan Operasi DVI akan lebih professional, efisien dan akuntabel.

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut terhadap keberlangsungan proyek perubahan yaitu:

1. Mendorong untuk keberlanjutan sinergitas kebencanaan dengan pembentukan klaster klaster kebencanaan sehingga semua stakeholder dapat berperan dan bertujas seperti tugas pokok masing masing untuk membantu masyarakat yang terdapat bencana sehingga proses membantu masyarakat yang terdampak bencana bisa segera terselesaikan secara tepat dan efisien.
2. Terus melaksanakan peningkatan kemampuan klaster klaster kebencanaan dengan secara rutin melaksanakan pelatihan dan koordinasi sehingga dalam menghadapi bencana yang sebenarnya semua stakeholder dapat segera berperan dalam membantu korban korban terdampak bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Bairizki, A, Irwansyah, R, Arifudin, O., Asir, M., Wijiharta, Ganika, G., G., et al. (2021). *Manajemen Perubahan* Bandung: Widina Bakti Persada.
- Cube, G. (n.d) Bite size Revolution with Microlearning: Small Chunks, Big Returns
- Davis, F. (1989). Perceived usefulness, perceive ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 319-340.
- Enterpreneur, J. (n.d). *Jurnal Enterpreneur: Strategi Pemasaran 4P dan Contoh Penerapan dalam Bisnis* Retrieved. Novembe Sunday, 6th November, 2022, from <https://www.jurnal.id/id/blog/stratetegi-pemasarann-4P-cara-penerapannya-dalam-bisnis/>
- Madjid, N.C. (2022), *Manajemen Keuangan Negara*. Jakarta.
- Mas. S. R., & Haris, I. (2020). *Komunikasi dalam Organisasi (Teori dan Aplikasi)*. Gorontalo UNG Press Gorontalo.
- Rochmansjah. H., & Karno, K. (2020). The Digitalization of Public Service Assurance. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 43-52.
- Santoso, B (2003). *Membangun organisasi pembelajar untuk meningkatkan produktifitas* Jakarta; Bina Sarana Ilmu.
- Venkatesh, V., Morris, M., Davis, G., Davis, F. (2003). *User Acceptance of Information Technology. Toward a Unified View. MIS Quarterly* Vol. 27 No. 3 425-478.



LAMPIRAN



EVIDENCE



SERTIFIKAT SEMINAR

Laporan Proyek Perubahan drg. Alfin Fardeni H.



DUKUNGAN STAKEHOLDER